

Judul Kegiatan		Kompilasi Produk Administrasi Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum
Tahun		2024
Jenis Statistik		Statistik Sektoral
Cara Pengumpulan Data		Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan		Pembangunan
Apakah mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS?		Tidak
Identitas Rekomendasi:		-
I. Penyelenggara		
1.1	Instansi Penyelenggara	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
1.2	Alamat	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bangka Selatan, Jl. Gunung Namak, Toboali
1.3	Telepon	(0718) 41666
1.4	Faksimile	(0718) 41666
1.5	Email	Bagkumhambasel@gmail.com
II. Penanggung Jawab		
2.1	Unit Eselon Penanggung Jawab	
	Eselon 1	-
	Eselon 2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan
2.2	Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)	
	Nama	Ami Prionggo, Sh
	Jabatan	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bangka Selatan
	Alamat	Jl. Angsana, Kota Toboali
	Telepon	0813 1020 0081
	Faksimile	Bagkumhambasel@gmail.com
	Email	-
III. Perencanaan dan Persiapan		
3.1	Latar Belakang	Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Adalah Untuk Mendorong Dan Mengoptimalkan Pembangunan Daerah Hanya Dapat Terwujud Apabila Pembentukan Produk Hukum Daerah Didukung Dengan Cara Dan Metode Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan, Kebutuhan Daerah Dan Kearifan Lokal.
3.2	Tujuan Kegiatan	Untuk Menyebarkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Kepada Seluruh Kalangan Masyarakat Dengan Memberikan Pelayanan Informasi Hukum Secara Lengkap, Akurat, Mudah, Dan Cepat.
Rencana Jadwal Kegiatan		
A. Perencanaan		
1	Perencanaan Kegiatan	01 September 2023 s/d 01 Januari 2024
2	Desain	01 September 2023 s/d 01 Januari 2024
B. Pengumpulan		

3.3	3	Pengumpulan Data	01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024		
	C. Pemeriksaan				
	4	Pengolahan Data	01 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024		
	D. Penyebarluasan				
	5	Analisis Data	01 April 2024 s/d 31 Desember 2024		
	6	Diseminasi Hasil	01 Desember 2024 s/d 31 Desember 2024		
	7	Evaluasi	01 Januari 2025 s/d 31 Januari 2025		
3.4	Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan:				
	No	Nama Variabel(Karakteristik)	Konsep	Definisi	Referensi Waktu(Periode Enumerasi)
	1	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati	Selama Pelayanan
	2	Peraturan Bupati	Peraturan Bupati	Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati	Selama Pelayanan
	3	Keputusan Bupati	Keputusan Bupati	Peraturan perundang-undangan daerah yang berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final	Selama Pelayanan
	4	Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati	Rancangan Peraturan Bupati	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Selama Pelayanan
	5	Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati	Rancangan Keputusan Bupati	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Selama Pelayanan
6	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Selama Pelayanan	
IV. Desain Kegiatan					
4.1	Kegiatan ini dilakukan		Berulang		

4.2	Frekuensi Penyelenggaraan	Tahunan
4.3	Tipe Pengumpulan Data	Longitudinal Panel
4.4	Cakupan Wilayah Pengumpulan Data	Sebagian Wilayah Indonesia
4.5	Wilayah Kegiatan	
	1 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
4.6	Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan Data Sekunder
4.7	Sarana Pengumpulan Data	Lainnya : pendokumentasian arsip
4.8	Unit Pengumpulan Data	Lainnya : Bagian Hukum Setda Bangka Selatan
VI. Pengumpulan Data		
6.1	Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)?	Tidak
6.2	Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data	Lainnya: Review Web JDIH
6.3	Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon?	Tidak
6.4	Petugas Pengumpulan Data	Staf Instansi Penyelenggara
6.5	Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data	Diploma Iv Atau S1 Atau S2 Atau S3
6.6	Jumlah Petugas	
	Supervisor/penyelia/pengawas	1
	Pengumpul data/enumerator	1
6.7	Apakah Melakukan Pelatihan Petugas?	Ya
VII. Pengolahan dan Analisis		
7.1	Tahapan Pengolahan Data	
	Penyuntingan(Editing)	Ya
	Penyandian(Coding)	Tidak
	(Data Entry)	Ya
	Penyahihan(Validasi)	Ya
7.2	Metode Analisis	Deskriptif
7.3	Unit Analisis	Lainnya: Bagian Hukum Setda
7.4	Tingkat Penyajian Hasil Analisis	Kabupaten/Kota
VIII. Diseminasi Hasil		
8.1	Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum	
	Tercetak(Hardcopy)	Ya
	Digital(Softcopy)	Ya
	Data Mikro	Tidak
8.2	Rencana Rilis Produk Kegiatan	
	Tercetak(Hardcopy)	1/31/2025
	Digital(Softcopy)	1/31/2025
	Datamikro	

No	Nama Variabel	Alias	Definisi	Konsep	Referensi Pemilihan	Referensi Waktu	Ukuran	Satuan	Tipe Data	Klasifikasi Isian	Aturan Validasi	Kalimat Pertanyaan	Apakah dapat diakses umum?
1	Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati	Rancangan Peraturan Bupati	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Rancangan Peraturan Bupati	-	2024	Jumlah	-	Integer	- = -	-	Pengajuan Rancangan Peraturan Bupati	Ya
2	Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati	Rancangan Keputusan Bupati	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Rancangan Keputusan Bupati	-	2024	Jumlah	-	Integer	- = -	-	Pengajuan Rancangan Keputusan Bupati	Ya
3	Peraturan Daerah	Perda	Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati	Peraturan Daerah	-	Tahunan	-	-	Integer	- = Peraturan Daerah	Peraturan	Berapakah jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan?	Ya
4	Peraturan Bupati	Perbup	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati	Peraturan Bupati	-	Tahunan	-	-	Integer	- = Peraturan Bupati	Peraturan	Berapakah jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan?	Ya
5	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Peraturan Daerah	Rancangan Produk Hukum Daerah memerlukan harmonisasi antara OPD pengusul dengan OPD pengampu.	Rancangan Peraturan Daerah	-	2024	Jumlah	-	Integer	- = -	-	Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah	Ya

No	Nama Indikator	Definisi	Konsep	Interpretasi	Metode/ Rumus Perhitung an	Ukuran	Satuan	Klasifikasi Penyajian	Apakah Indikator Komposit	Indikator		Variabel		Level Estimasi	Apakah dapat diakses umum?
										Nama	Publikasi Ketersedi aan	Nama	Kegiatan Penghasil		
1	Jumlah Peraturan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati	Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan				Kabupaten Bangka Selatan	Tidak			-	Peraturan Daerah	Kabupaten	Ya
2	Jumlah Peraturan Bupati	Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh bupati	Peraturan Bupati	jumlah Peraturan Bupati yang diterbitkan				Kabupaten Bangka Selatan	Tidak			-	Peraturan Bupati	Kabupaten	Ya